

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
KATA PENGANTAR	III
SURAT PERNYATAAN.....	V
MOTTO.....	VI
PERSEMBAHAN	VII
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	16
C. TUJUAN PENELITIAN	16
D. KEGUNAAN PENELITIAN	16
E. KERANGKA TEORI	17
1. Teori Hukum Progresif	17
2. Teori Keadilan	30
3. Teori Kemanfaatan	45
F. KERANGKA PEMIKIRAN.....	49
G. KERANGKA KONSEPTUAL.....	50
H. METODE PENELITIAN	53
1. Paradigma Penelitian.....	54
2. Metode Pendekatan	55
3. Pendekatan Hermeneutik	57

4. Spesifikasi Penelitian	61
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian	63
6. Teknik Pengumpulan Data.....	64
7. Teknik Analisis Data.....	65
I. ORISINALITAS PENELITIAN	65
J. SISTEMATIKA PENULISAN	70
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	72
A. REKONSTRUKSI	72
B. TINDAK PIDANA KORUPSI.....	73
C. TUGAS DAN WEWENANG HAKIM.....	95
D. PUTUSAN PENGADILAN	112
E. SISTEM PEMIDANAAN	135
F. TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN	139
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI	146
A. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	146
B. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi	184
C. Dampak Penjatuhan Putusan Pidana Minimum Khusus Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	192
D. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum Khusus	195

E. Proses Penemuan Hukum Oleh Hakim Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Mengesampingkan Ketentuan Pidana Minimum Khusus	208
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM MENCERMINKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF	
219	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Belum Mencerminkan Putusan Yang Progresif.....	219
B. Kendala-Kendala Dalam Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Beserta Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Dalam Menjalankan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	245
BAB V REKONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF	
258	
A. Rekonstruksi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 dan PANCASILA	258
B. Perbandingan Negara Lain.....	267
1. Singapura.....	267
2. Malaysia	268
3. Hongkong	274
4. Thailand.....	277
C. Rekonstruksi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Progresif.....	281
1. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang	

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	281
2. Konsep Pasal Hasil Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	284
BAB VI PENUTUP	316
A. Simpulan	316
B. Saran	319
C. Implementasi Kajian Disertasi	320
DAFTAR PUSTAKA	322

